KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Johan Budi Dicopot dari BURT
Tanggal : Rabu, 02 November 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Johan Budi Dicopot dari BURT

DPR diharapkan bisa menyelesaikan 15 rancangan undang-undang (RUU) pada masa sidang II 2002-2023. Ke-15 RUU itu dalam tahap pembahasan tingkat I. "DPR bersama pemerintah dan DPD akan menyelesaikan pembahasan sebanyak 15 RUU," kata Ketua DPR Puan Maharani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

DPR juga mengesahkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Badan Legislasi (Baleg) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) telah menyepakati bakal beleid yang akan dibahas pada 2023 sebanyak 38 RUU.

"Prolegnas RUU Prioritas 2023 sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan RUU oleh DPR dengan pemerintah, baik RUU yang berasal dari DPR dan pemerintah maupun DPD," ungkap dia.

Selain itu, DPR diminta selalu mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi dan kesimpulan rapat kerja dengan mitra. Rapat kerja senantiasa dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja kementerian dan lembaga sehingga berbagai masalah rakyat dapat diselesaikan. "Rakyat menaruh harapan kepada tugas konstitusional DPR untuk membuat hidupnya semakin baik," tegas Puan.

Sementara itu, Johan Budi dicopot sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Informasi tersebut dibenarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar. "Iya, Pak Johan Budi diganti," kata Indra saat dihubungi, kemarin.

Namun, Indra tak menjelaskan alasan penggantian Johan. Dia hanya menyebut sosok yang diajukan Fraksi PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua BURT yang baru. "Diganti Pak Dede Indra Permana," ujar dia.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan pemberhentian Johan tidak terkait dengan Dewan Kolonel.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan pemberhentian Johan tidak terkait dengan Dewan Kolonel. "Kalau dugaan saya, enggak," kata Utut di kompleks parlemen, Senayan, kemarin.

Wakil Ketua Komisi I DPR itu mengaku tak mengetahui secara rinci alasan rotasi perwakilan PDI Perjuangan di pimpinan BURT sebab hal itu merupakan keputusan DPP.

Hal serupa juga disampaikan Johan. Menurut dia, penggantiannya sebagai Wakil Ketua BURT tak ada sangkut pautnya dengan Dewan Kolonel. "Jadi, dari pagi tadi banyak yang WA (*Whatsapp*) saya, seolah-olah ini ada kaitannya dengan Dewan Kolonel, saya kira enggak ada ya, kalau menurut saya enggak ada," kata Johan, kemarin. (Atm/Sru/P-5)